



# BULETIN Parlementaria

NOMOR 943/III/I/2017



## KOMISI V DPR RI TUNTUT PENGELOLA STIP BERTINDAK TEGAS

6

INDONESIA BERTERIMA KASIH ATAS  
TAMBAHAN KUOTA HAJI

17

KOMISI V DPR RI BAHAS BERBAGAI  
INSIDEN TRANSPORTASI DENGAN MENHUB

**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan

# Komisi V DPR RI Tuntut Pengelola STIP Bertindak Tegas

Menyusul tragedi tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) beberapa waktu lalu, Komisi V DPR RI menuntut pengelola STIP untuk bertindak lebih tegas. Ini bukan tragedi pertama di STIP. Tragedi kekerasan yang terus berulang, membuat Komisi V berandang ke kampus STIP di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara untuk melakukan investigasi.

Dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, delegasi Komisi V bertemu dengan Kepala Balai Pendidikan dan para pengelola STIP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (12/1). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan para Anggota Komisi V menghujani berbagai pertanyaan kritis kepada pengelola STIP dengan nada emosional. Komisi V juga sangat menyayangkan tragedi yang terus berulang sekaligus turut berduka atas kematian taruna STIP.

Fary usai pertemuan menyatakan dengan tegas, Komisi V tak sedikit pun mentolerir kekerasan terjadi di lembaga pendidikan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Ada tiga langkah yang mungkin direkomendasikan Komisi V. Pertama, menutup STIP karena kekerasan terus berulang. Kedua, ditutup sementara dan para taruna dititipkan ke beberapa STIP terdekat. Ketiga, STIP bisa tetap beroperasi dengan catatan pengawasan dan pembinaan dilakukan secara ketat.

Semua temuan yang didapat di STIP, kata Fary, akan dialami oleh Komisi V untuk kemudian memberi rekomendasi resmi kepada Kemenhub, terutama

pengelola STIP. Mencermati tragedi yang berulang ini, Fary menduga, kemungkinan kekerasan hampir setiap hari terjadi di STIP. Hanya saja banyak yang tidak



Tim Komisi V DPR RI berandang ke kampus STIP di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara

terungkap. Mungkin juga karena tidak ada korban tewas, maka kekerasan tak terungkap ke publik.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V yang diwakili semua fraksi, mempertanyakan, sistem pengawasan di dalam kampus. Bila pengawasan berjalan baik, mestinya tidak terjadi kekerasan yang berulang. "Ini berarti pengawasan di dalam tidak berjalan. Dan siapa saja

pengawas yang bertugas juga belum jelas," ujar Fary.

Dalam waktu dekat, Komisi V, sambung Fary lagi, akan memanggil penanggung jawab dan pengelola STIP ke DPR RI. Kesepakatan yang pernah dibuat pada 2014 dengan pihak STIP, ternyata tidak dijalankan. Seperti diketahui, taruna yang tewas karena kekerasan seniornya adalah Amirulloh Adityas Putra (18), yang merupakan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komisi V juga sempat melihat kamar 205 di Dormitory Ring 4, tempat kekerasan terjadi. Kamar tersebut sudah dipasang *police line*.

Pada 2014, Komisi V sendiri pernah berkunjung ke STIP untuk kasus tewasnya seorang taruna bernama Dimas Dikita Handoko. Ketika itu, Komisi V secara resmi sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satu isinya menyerukan agar STIP ditutup saja bila terjadi kasus kekerasan lagi. Dan ternyata di tahun 2017, kasus serupa yang menewaskan tarunanya terulang kembali. Bahkan, ada beberapa taruna mudanya yang mengundurkan diri, karena tak kuat menerima banyak perlakuan kekerasan oleh seniornya.

Ironisnya, di lapangan kampus tersebut ada banner besar bertuliskan: "Pelaku tindak

kekerasan/pemukulan akan dikeluarkan dari STIP". Ironis, kekerasan tetap saja terjadi. Tulisan yang begitu besar, ternyata tak cukup menggugah para taruna senior. Dan kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan pihak STIP dan otoritas Kemenhub pada 2014 lalu, hanya dipandang sebagai kesepakatan belaka, tanpa ditindaklanjuti. Komisi V pun pantas geram pada STIP. ■

## DPR RI Harap Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Tetap Berjalan

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) di Rembang, Jawa Tengah agar tetap berjalan. Peralnya, kehadiran pabrik semen tersebut diyakini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan warga sekitarnya.

“ Kehadiran pabrik semen diyakini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan warga sekitarnya, maka pabrik semen itu supaya tetap berjalan, masyarakat di sana tidak rugi,” kata Novanto saat menerima perwakilan warga lima desa yang berada di sekitar pabrik PT. Semen Indonesia Rembang yang menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/01).



Ketua DPR RI, Setya Novanto didampingi Anggota Komisi VI DPR RI

Dalam pertemuan yang didampingi Anggota Komisi VI DPR RI yaitu Lili Asjudiredja, Bowo Sidik Pangarso, Endang Sri Kanti dan Iskandar Dzulkarnain Syaichu tersebut, ia menyatakan pembangunan pabrik semen tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan produksi yang merupakan salah satu komponen pembangunan fisik di republik ini.

"Dengan semakin besar jumlah produksi diharapkan harga semen semakin murah bagi rakyat. Baik bagi pemerintah maupun masyarakat supaya ini bisa memberi manfaat bagi pembangunan, dan harga di pasar menjadi lebih murah," harapnya.

Terhadap persoalan Amdal yang masih diperdebatkan, ia berharap ada jalan keluar yang tidak mengganggu kepentingan semua pihak terutama masyarakat sekitar. Sebab, jika pembangunan terhenti tentu rakyat yang telah merasakan manfaat kehadiran pabrik tersebut akan terganggu. "Kita akan sarankan gubernurnya mencari jalan keluar. Aturan hukum tetap berjalan dan produksi tetap juga bisa berjalan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Apalagi, sambung Novanto, Komisi VI DPR RI sudah melakukan kunjungan kerja ke lokasi pabrik semen tersebut. "Yang penting sudah ada kunjungan spesifik komisi VI ke pabrik Semen Indonesia, evaluasinya juga sudah ada. Kalau saya baca ini produksinya 3 juta ton per tahun. Ini berguna untuk memenuhi produksi di Pulau Jawa," pungkasnya.

"Kita akan perjuangkan supaya pabrik ini bisa berjalan, proses tetap berjalan," tutup Novanto.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama salah satu perwakilan warga, Sakir, menyatakan bahwa ia bersama perwakilan warga lainnya sengaja datang ke DPR RI membawa aspirasi dari warga yang mayoritas mendukung berdirinya PT. Semen Indonesia yang berada di Rembang, Jawa Tengah.

"Mohon aspirasi diteruskan kepada pemerintah dan mohon bantuannya agar pabrik semen Indonesia tetap berdiri di Rembang. Karena sudah banyak manfaat kesejahteraan yang dirasakan keberadaannya oleh warga sekitar pabrik Rembang," ujarnya.

Ia beralasan, apabila pabrik betul-betul berlanjut di Rembang, maka kehidupan warga Rembang akan maju dan sejahtera. ■

(s), foto: jawa nugraha/br.



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI

**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

**PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI** Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI** Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos  
**SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto  
**ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



### PENERBITAN & DISTRIBUSI

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Subadri, S.E, Bariliansyah, Fathurahman, Mujiono

**SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNG BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

## PP 72/2016 Menggantung Pengawasan DPR RI Pada Kementerian BUMN

Langkah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 kemarin dinilai menggantung pengawasan DPR RI terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

“ Dalam catatan saya, PP No. 72/2016 merupakan upaya lanjutan untuk menggantung pengawasan DPR RI terhadap BUMN, dimana upaya-upaya awalnya sudah lama dilakukan pemerintah. Untuk membiayai program infrastruktur, misalnya, pemerintah yang sedang tidak punya uang telah mendorong BUMN untuk membuat utang utang sendiri, seperti yang dilakukan sejak 2015 lalu,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam rilisnya yang disampaikan kepada Parlemen, baru-baru ini.

Fadli menegaskan, PP No. 72/2016 yang melonggarkan tata cara penyertaan modal negara dan pengalihan kekayaan negara pada BUMN dengan tanpa harus melalui persetujuan DPR RI, jelas bermasalah.

Aturan itu, lanjutnya, bahkan bisa mengarah kepada pelanggaran konstitusi yang serius. Sebab, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan obyek APBN, yang pembahasannya, sesuai

dengan UUD 1945 Pasal 23, harus dibahas dan disetujui oleh DPR RI.

"Sebagai obyek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan DPR RI. Itu juga merupakan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah tidak bisa seenaknya merusak mekanisme ketatanegaraan dengan

menyusun aturan yang bertentangan dengan undang-undang, dan bahkan konstitusi," papar politisi Gerindra ini.

Ia menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dalam kaitannya dengan proyek pembangunan infrastruktur bisa dianggap sebagai bentuk *fait accompli* terhadap pengawasan DPR RI.

Sebab, di atas kertas setiap utang luar negeri pemerintah seharusnya melalui persetujuan DPR RI. Namun, dengan melempar utang itu ke BUMN, dengan menjadikan seolah berbagai proyek pembangunan infrastruktur adalah proyek "B to B" dari BUMN, maka persetujuan DPR RI itu seolah tidak lagi diperlukan. Kini, pengguntingan peran DPR RI itu ingin dilakukan juga dalam kaitannya dengan pengalihan kekayaan negara. Pemerintah seolah ingin berjalan tanpa kontrol. Ini berbahaya sekali.

"Saya masih melakukan kajian, tapi penerbitan PP No. 72/2016 ini menurut saya ada kaitannya dengan rencana Kementerian BUMN yang meminta

Pertamina untuk mengakuisisi Perusahaan Gas Negara (PGN). Itu sudah jadi kontroversi dalam dua tahun terakhir, karena banyak sekali keanehan dalam rencana itu," ungkapnya.

Pertamina adalah perusahaan negara yang seratus persen sahamnya dimiliki pemerintah, teranginya, sementara PGN adalah BUMN yang sudah *go public* dan sebagian sahamnya dimiliki asing. Sebelum Pertamina mengakuisisi PGN, sebelumnya PGN akan mengakuisisi terlebih dahulu Pertagas, anak perusahaan Pertamina yang *core business*nya sama dengan PGN.

Kerumitan itulah, menurut Fadli, yang selama ini disebut oleh Menteri BUMN sebagai usaha untuk membangun *holding* BUMN migas. Ada banyak hal yang ganjil terkait rencana itu. Dan semua keganjilan itu kini ingin diloloskan dari pengawasan dan kontrol DPR RI melalui penerbitan PP No. 72/2016. Menurutnya, ini tidak boleh dibiarkan.

"Perlu penjelasan dari pemerintah mengenai hal ini. Supaya tidak ada yang ditutup-tutupi, semua harus diteliti dan didalami, agar jelas duduk perkaranya. Jangan sampai kekayaan negara kita, baik yang berupa kekayaan alam, maupun BUMN, sedikit demi sedikit kemudian tidak lagi berada dalam penguasaan dan kontrol negara karena aksi yang gegabah dari Kementerian BUMN. Sudah cukup kasus lepasnya Indosat dulu, jangan lagi kebodohan serupa kini diulangi lagi," tegasnya. ■

## Debat Pilkada Terbuka untuk Sughkan Ide dan Gagasan Secara Utuh

Tahapan Pilkada DKI Jakarta akan memasuki penyampaian visi dan misi yang diadakan oleh KPU DKI Jakarta pada Jumat (13/01) malam ini. Melalui ajang dikenal dengan Debat Terbuka itu, para kontestan Pilkada DKI Jakarta dapat memamparkan pikiran dan gagasannya sendiri-sendiri, tanpa berinteraksi langsung antara satu sama lain.

**W**akil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan mengatakan, melalui debat terbuka yang formal disertai para panelis yang independen, berkualitas dan mumpuni di bidangnya masing-masing sesuai dengan dinamika dan tantangan kehidupan ibukota Jakarta, masyarakat akan disughkan ide, gagasan dan pemikiran yang utuh.

"Sehingga para calon mampu menjelaskan sekaligus mengklarifikasi berbagai persepsi yang mungkin kurang bisa dipahami publik selama ini. Terlebih dari itu, juga bisa menjernihkan berbagai kesimpang-siuran tentang figur dan pemikirannya selama ini," harap Taufik, dalam rilisnya kepada Parleментарia, Jumat (13/01) petang.

Apalagi, lanjut Taufik, Jakarta adalah Ibukota Negara yang sejatinya menjadi contoh bagaimana kehidupan masyarakat dengan segala dinamikanya, yang perlu di dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pilkada DKI Jakarta memang cukup menarik untuk disimak. Karena itu, kita berharap debat ini akan menyajikan tradisi yang mencerdaskan, meneguhkan nilai-nilai demokrasi dan menyajikan harapan-harapan yang sesungguhnya diinginkan oleh warga," imbuh Taufik.

Bagaimanapun, masih kata Taufik, masyarakat adalah penentu keterpilihan para kontestan. Setelah selama ini pasangan Agus H Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berkunjung dan berinteraksi dengan segenap masyarakat

di berbagai wilayah DKI Jakarta, tibalah saatnya mereka berinteraksi satu sama lain dengan sejumlah persoalan yang akan diajukan para panelis.

"Ini adalah tradisi yang baik. Calon-calon pemimpin adalah mereka yang sesungguhnya telah memiliki rencana tentang DKI Jakarta Masa Depan," ujar politisi F-PAN itu.

Taufik melihat, berbagai program yang dikemas dalam visi dan misi akan saling mengisi ruang pemikiran masyarakat luas, hingga masyarakat akan menentukan pasangan mana yang layak dan sesuai dengan kehendak mereka.

"Saya mengapresiasi semua pihak yang bekerja keras dalam menyughkan debat kali ini. Tentu saja, harapan kita bersama akan lahir pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Debat adalah instrumen bagi masyarakat untuk menentukan pasangan yang layak meraih kemenangan dalam kontestasi Demokrasi DKI Jakarta," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, debat terbuka pertama Cagub-Cawagub DKI Jakarta akan digelar pada Jumat (13/01) pukul 20.00 WIB di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat berlangsung selama dua jam dan dibagi menjadi enam sesi.

Debat perdana ini akan mengangkat tema pembangunan sosial-ekonomi untuk Jakarta. Ada beberapa isu utama, di antaranya seputar sosial-ekonomi,

lingkungan, transportasi, serta pendidikan dan keamanan warga.

KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan empat panelis dan satu moderator yang akan memimpin jalannya debat terbuka perdana Cagub-Cawagub DKI 2017. Empat panelis yang dipilih yakni dari kalangan akademisi dan profesional.

Keempat panelis tersebut yakni DR Imam Prasodjo (dosen Universitas Indonesia), Prof. DR. Aceng Rahmat, M.Pd (dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta), DR Yayat Supriyatna (dosen Universitas Trisakti) dan DR Enny Sri Hartati (direktur Institute For Development of Economics and Finance). Sedangkan moderator yang memandu jalannya debat yakni Dwi Noviratri Koesno atau yang lebih populer dengan nama Ira Koesno. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

## Indonesia Berterima Kasih atas Tambahan Kuota Haji

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto sebagai Ketua Tim Pengawas Haji menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah menambah kuota haji Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun 2017. Arab Saudi menerima dengan baik atas usulan penambahan kuota tersebut.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Agus saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di ruang kerjanya, Selasa (17/1). "Kami berterima kasih atas tambahan kuota haji Indonesia 10 ribu orang kepada Pemerintah Arab Saudi," ucapnya di hadapan Dubes Arab Saudi.

Kebetulan pada tahun ini Agus juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengawas Haji. Jadi ia sangat berkepentingan dengan pelaksanaan haji tahun ini. Sementara Dubes Arab Saudi juga menyatakan kesiapannya atas tambahan kuota haji Indonesia. Logistik dan akomodasi sudah disiapkan untuk menyambut jemaah haji Indonesia. Apalagi, jemaah haji Indonesia, katanya, paling disiplin dan tertib.

"Penambahan kuota haji sudah lama diperjuangkan. Usaha ini intens dilakukan dengan mendekati Kerajaan Arab Saudi. Kita tahu yang menjadi calon haji bisa 10-

14 tahun harus menunggu. Kita, kan, sedih sebagai wakil rakyat. Dan itu kita sampaikan kepada para petinggi di Arab Saudi. Itulah hasil dari semua usaha, tidak hanya oleh DPR RI tapi juga oleh pemerintah, untuk memperoleh tambahan kuota tersebut," ungkap Agus usai pertemuan.

Seperti diketahui, selama Masjidil Haram dalam pengerjaan perluasan daya tampung, kuota haji Indonesia sempat dikurangi. Kini, kuota tersebut sudah dikembalikan normal sebesar 211 ribu jemaah. Bahkan, pada pelaksanaan haji 2017 ini, Pemerintah Arab Saudi menerima usulan Indonesia untuk menambah kuota 10 ribu lagi, sehingga menjadi 221 ribu jemaah.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto terima Dubes Arab Saudi

Pada kesempatan yang sama, Dubes Arab Saudi juga menyampaikan rencana kedatangan Ketua MPR Arab Saudi ke Indonesia pada pertengahan Februari nanti. Atas rencana kunjungan tersebut, Agus menyatakan, siap menerima kedatangan Ketua MPR Arab Saudi dengan baik. Ini bagian dari diplomasi parlemen untuk peningkatan hubungan kedua negara. ■

(amb), foto: ariffibr

## Fahri Hamzah Bahas Kunjungan Raja Salman dengan Dubes Saudi Arabia

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menerima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Osamah Mohammed Alshuibi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01). Fahri menyebutkan salah satu bahasan dalam pertemuan tertutup itu ialah persiapan kunjungan Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud pada awal Maret mendatang.

“Kunjungan ini bersifat historis karena Raja Salman akan berada di Indonesia sepekan lebih dan saya kira ini adalah kunjungan kepala negara yang paling lama di Indonesia,” kata Fahri usai menerima Dubes Arab Saudi untuk Indonesia.

Lebih lanjut, politisi F-PKS ini menyebutkan kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi akan sangat monumental bagi kedua negara. Pasalnya, pada kunjungan tersebut, Raja Arab akan didampingi oleh hampir seluruh jajaran menteri dan pejabat negara Saudi Arabia.

"Rombongannya besar sekali, lebih dari 800 orang



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah menerima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi

sehingga Pak Dubes mengharapkan bantuan dan dukungannya agar kedatangan beliau akan menjadi momen yang sangat penting bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan kerja sama," jelas Fahri.

Selain itu, kepada Dubes Osamah Mohammed Alshuibi, Fahri mengucapkan terima kasih atas dikembalikannya kuota jemaah haji Indonesia. Ia berharap, dengan tambahan 10 ribu kuota haji dapat

dipergunakan sebaiknya dan meminta Pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan fasilitasnya untuk jemaah haji.

Fahri juga mengimbau agar penambahan kuota diutamakan kepada para calon haji yang berusia lanjut sehingga ibadah 1 kali seumur hidup ini bisa mereka laksanakan "Kalau bisa, antrean jemaah kita yang sudah lansia kita selesaikan dahulu. Kalau ada yang

umur 90 tahun, kita prioritaskan semua, kemudian umur 80 dan seterusnya atau kalau setorannya sudah cukup, ya kita prioritaskan saja langsung," imbaunya.

"Bahkan kalau setorannya belum selesai pun, namun sudah memberikan uang muka, Badan Pengelola Keuangan Haji harusnya tetap bisa memberangkatkan, selama mereka ada yang menjamin," imbuh Fahri. ■

(amr,pp), Foto: rami/dr

## Pengajian PIA DPR RI Ungkap 10 Pintu Syetan Menggoda dan Masuk Dalam Diri Manusia

Ketua umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI, Deisti A Novanto berharap melalui pengajian rutin setiap bulan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada anggota PIA dan seluruh jajaran di DPR RI tentang bagaimana meneladani sikap dan perilaku Rasulullah SAW.

“ Pengajian kali ini merupakan perdana digelar di tahun 2017 sekaligus dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bersama ustadzah Dedeh Rosyidah atau yang akrab disapa Mamah Dedeh ini bisa menambah ilmu dan wawasan keagamaan bagaimana bersikap dan berperilaku keseharian menurut Al Quran. Serta bagaimana meneladani perilaku Rasulullah SAW,"ungkap Deisti usai pengajian di Masjid Baiturahman, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).



Suasana pengajian PIA DPR RI di Masjid Baiturahman

Deisti bersyukur dengan antusias para peserta pengajian. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta pengajian kali ini yang melebihi pengajian-pengajian sebelumnya. Tidak hanya itu, komunikasi yang sangat interaktif dari ustadzah dan para peserta juga berjalan sangat lancar. Tidak sedikit pertanyaan yang diajukan para peserta pengajian terkait perilaku keseharian yang dijawab dengan sangat lugas oleh mamah dilihat dari kacamata hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Ia berharap ke depan, jumlah peserta

dapat lebih diperbanyak dan ditingkatkan lagi. Mengingat manfaat yang akan diterima dari pengajian tersebut sangat besar. Termasuk menjadi bekal dalam mendampingi para suami yang tak lain adalah anggota DPR RI dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh rakyat dan negara.

Sementara itu menurut Mamah Dedeh, kesempatan ini merupakan kedua kalinya ia berceramah dan berbagi ilmu di gedung DPR RI, setelah sebelumnya pada tahun 1990-an. Ke depan ia berharap anggota PIA dan seluruh pegawai DPR RI di tengah kesibukan dan rutinitasnya

terap tetap menyempatkan diri mengikuti pengajian. Lewat pengajian dapat memperbaiki kualitas hidup manusia, sekaligus sebagai bekal di akhirat kelak.

Pada kesempatan itu pengajian mengusung tema "Melalui Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW kita teladani dan implementasikan Akhlaqul Kharimah Rasulullah SAW dalam Kehidupan Bermasyarakat."

Dengan Subtema berjudul Sepuluh Pintu Setan Menggoda dan Masuk dalam diri manusia itu, Mamah Dedeh menjelaskan bahwa ada sepuluh perilaku manusia yang memudahkan setan masuk dan menggoda. Diantaranya adalah lewat rasa marah, rakus akan jabatan dan harta serta keduniawian, rasa kenyang, berhas yang berlebihan, memuji orang dengan pamrih, ibadah terburu-buru sementara urusan duniawi berlama-lama, elit serta fanatik suku, partai dan organisasi yang berlebihan. ■

(Ayu), foto : ruzka/dr

## Delegasi Perempuan Indonesia Mendapat Apresiasi

*Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Women Parliamentarian Meeting* atau Pertemuan Perempuan Parlemen Asia Pasifik mengapresiasi Indonesia yang menempatkan banyak perempuan di posisi penting dalam pengambilan kebijakan. Indonesia dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesetaraan gender di semua tingkatan, baik dalam parlemen maupun eksekutif.

Demikian mengemuka dalam *APPF Women Parliamentarian Meeting*, yang merupakan rangkaian Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji, 15-19 Januari 2017. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra).

Indonesia melalui delegasinya, dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (16/01), sejak awal memang sangat gigih dalam mengajak untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menyerukan agar menduduki posisi penting sebagai pengambil kebijakan di negaranya masing-masing.

Bahkan, delegasi Indonesia yang juga Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf didaulat sebagai *co-chair APPF Women Parliamentarian Meeting*, sementara Ketua Parlemen Fiji sebagai tuan rumah penyelenggara, disepakati yang menjadi chair.

"Ini menunjukkan demokrasi di Indonesia sudah maju. Jadi artinya keterlibatan perempuan di Indonesia mereka juga apresiasi karena peran perempuan Indonesia di forum ini," ujar Nurhayati di Fiji, Minggu (15/01) waktu setempat.

Nurhayati juga mengisahkan, delegasi Indonesia merupakan salah satu inisiator dari acara tersebut. Sebelumnya, dalam APPF ke-23 2015 di Ekuador, delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan pentingnya pertemuan perempuan parlemen. Hal itu akhirnya pertama kali terlaksana di APPF ke-24 di Kanada 2016 meski belum masuk dalam agenda di dalam statuta APPF. Nurhayati pun dengan lantang menyuarakan pertemuan parlemen perempuan Asia Pasifik bisa masuk



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon dan Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf

dalam agenda resmi APPF.

"Indonesia juga memasukkan draf resolusi tentang keterlibatan perempuan di semua level pengambil kebijakan. Kemudian juga mengusahakan supaya *woman meeting* ini menjadi bagian dari agenda pertemuan APPF selanjutnya atau masuk agenda resmi rangkaian APPF," ujar politisi F-PD itu.

Dilihat dari segi parlemen, masing-masing, perwakilan perempuan di parlemen, di Asia Pasifik masih berada di bawah 19,2 persen. Sementara perwakilan perempuan di Pasifik lebih rendah, yakni 16,4 persen. Atau dengan kata lain, tertinggal di bawah representasi yang diinginkan, yaitu 30 persen.

Menurut Nurhayati, dibutuhkan langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, Indonesia meyakini bahwa peran kepemimpinan dan perwakilan perempuan dibutuhkan di tingkat parlemen.

"Partisipasi perempuan di parlemen sangat penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi, perihal pelecehan, dan demokrasi," tegas

politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia yang juga Anggota BKSAP Desy Ratnasari menambahkan, Indonesia juga telah memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan. Hal ini akan memberika ruang yang luas kepada kaum perempuan untuk terlibat

dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Politisi F-PAN itu menambahkan, Parlemen Indonesia juga telah mengalokasikan peningkatan anggaran kepada pemerintah untuk menjalankan program peningkatan kemampuan dan *capacity building* serta berbagai pelatihan. Di dalam parlemen Indonesia peran perempuan semakin besar bahkan bisa menduduki pimpinan dalam komisi-komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Sidang tahunan APPF tahun ini dibuka secara resmi oleh ketua parlemen dari tuan rumah Fiji, Jiko Luveni pada Senin (16/01) waktu setempat, dan mengangkat tema "Kerja Sama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan".

Beberapa delegasi Indonesia yang ikut dalam Forum Parlemen Asia Pasifik di antaranya Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Anggota BKSAP DPR RI diantaranya Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Rahayu Saraswati Dhirakarya Djohadikusumo (F-Gerindra), Sartono Hutomo (F-PD), dan Desy Ratnasari (F-PAN). ■



## PP 72 Tahun 2016 Bertentangan Dengan UU BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Menurutnya PP tersebut berbahaya karena BUMN bisa dialihkan ke perusahaan swasta atau asing. Ia juga menegaskan PP tersebut bertentangan dengan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“ Dengan aturan tersebut bisa terjadi pemindahtanganan aset BUMN kepada Perseroan Terbatas, baik milik BUMN maupun swasta lainnya, bahkan asing dengan cara dijadikan penyertaan modal negara dalam suatu perusahaan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Parlemen pada Sabtu, (14/01).

Politisi Hanura ini memberikan contoh, perusahaan seperti Pertamina yang merupakan BUMN bisa saja dialihkan ke perusahaan asing dengan mekanisme penyertaan modal negara. “Contohnya, bisa saja suatu aset negara di Pertamina dijadikan penyertaan modal negara di PT Chevron Indonesia. Aturan ini sangat berbahaya. Karena aset negara bisa pindah ke perusahaan asing,” tuturnya.

Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa mekanisme APBN, sambung Inas, berarti bisa juga negara memberikan suntikan modal

ke perusahaan asing atau swasta lainnya. “Ini jelas menabrak UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN,” tegas Inas.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 2A PP 72 tahun 2016 menuai banyak kontra. Pasalnya negara bisa melepaskan kepemilikannya di sebuah perusahaan tanpa melalui DPR RI. Berikut bunyi PP 72 tahun 2016 pasal 2A : (1) “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Dalam pasal 2A PP 72 tahun 2016 dinyatakan dengan jelas bahwa PMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dilakukan oleh

pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Terkait hal ini, Inas menjelaskan bahwa di dalam UU BUMN sudah dijabarkan bahwa yang namanya BUMN adalah seluruh atau sebagian sahamnya adalah milik negara. “Padahal UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang namanya B U M N adalah seluruh atau sebagian besarnya sahamnya milik negara,” pungkasa Inas. ■



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir

(foto: rana/br)

## BKD Terima DPRD Mojokerto Bahas Penggunaan Anggaran

Badan Keahlian Dewan (BKD) audiensi dengan DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/01). Saat diskusi dibicarakan soal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang agenda kegiatan DPRD, serta tata tertibnya yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Tentunya hal tersebut disesuaikan dengan sudut pandang peraturan di atasnya.

L akhar Kepala Badan Keahlian Inosentius Samsul menjelaskan, yang terpenting DPRD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan

penggunaan anggaran memiliki komitmen bersama. “Supaya dalam pelaksanaan tugasnya itu ada komitmen bersama,” ujar Samsul saat berdiskusi.

Dia juga menjelaskan tentang peraturan yang menjadi turunan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya mengatur tentang pedoman dalam penyusunan tata tertib. Bagaimana pedoman dalam penyusunan perundang-undangan.

“Pembuatan tatib harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Karena dalam undang-undang MD3 ada perintah, membuat peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan tata tertib



Suasana Badan Keahlian Dewan (BKD) audiensi dengan DPRD Kabupaten Mojokerto

dengan rujukan peraturan pemerintah,” jelas Samsul.

Menanggapi masukan dari BKD Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto Sipon Diharso mengucapkan terimakasih atas diterimanya rombongan dan berharap semoga dengan penjelasan yang diterima bisa mempermudah pelaksanaan tugas di Kabupaten Mojokerto. ■

(foto: mpj). Foto: juka/br

## Satya W. Yudha Kembali Menduduki Kursi Pimpinan Komisi VII DPR RI

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Satya W. Yudha kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menggantikan rekan satu fraksinya Fadel Muhammad.

Rapat penetapan penggantian pimpinan Komisi VII tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Ruang Rapat Komisi VII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01)

Dalam kesempatan tersebut, Satya demikian sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar yang telah kembali memilih dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

"Insya Allah ke depan kita akan melanjutkan semua komitmen-komitmen yang sudah kita sepakati dan menjadi keputusan Komisi VII didalam mengelola baik itu di sektor energi dan tidak kalah penting masalah lingkungan hidup," kata Satya.

Masalah lingkungan hidup, menurutnya, merupakan komitmen yang sangat luar biasa. Karena DPR RI telah mensepakati Perjanjian Paris dimana memerlukan sinergitas dengan beberapa kementerian dalam rangka mencapai apa yang telah dikomitkan yaitu untuk mengurangi emisi karbon 29%.

"Jadi ini merupakan satu sektor yang tidak kalah penting di Komisi VII, begitu pula di sisi riset dan teknologi yang kita tidak henti-hentinya memacu supaya inovasi teknologi bisa menjembatani terhadap keterpurukan daripada cadangan fosil yang kita miliki saat ini," jelasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Fadel Muhammad menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan tugas dan diminta untuk mengerjakan tugas yang lain dari Partai Golkar, namun sementara ini sampai dengan akhir masa sidang ini ia masih tetap berada di Komisi VII.

Secara jujur, Fadel mengungkapkan bahwa ia minta izin kepada Partai Golkar untuk mendampingi isterinya yang diminta oleh rakyat Gorontalo dan didukung enam partai yaitu PDIP, PPP, Gerindra, PKB, Perindo dan Nasdem untuk mengikuti Pilkada di sana.

Ia menegaskan, beberapa tugas di Komisi VII menanti, kilang minyak adalah sebuah keharusan yang harus dibuat dan sudah merupakan kesepakatan Komisi VII, dan dua UU yang sedang dikerjakan

baik UU Migas maupun UU Minerba.

"Saya menghaturkan terima kasih kepada teman-teman atas kerjasama yang baik selama ini dan saya mohon maaf jika selama saya selama memimpin bersama dengan teman-teman yang lain ada hal-hal yang kurang. Juga saya haturkan terima kasih kepada Tim Sekretariat dan Staf Ahli yang rajin bekerja membantu kami. Semoga Komisi VII tetap berjaya," pungkasnya. ■

(s) Foto: Arif/br



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha memegang palu Pimpinan

## LSF Dituntut Lindungi Masyarakat Dari Film Negatif

Komisi I DPR RI mendorong Lembaga Sensor Film (LSF) untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang melindungi masyarakat dari pengaruh film negatif. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafidz sebagaimana kesimpulan saat RDP dengan LSF pada Senin, (16/01) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Komisi I DPR RI mendorong lembaga sensor film untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi LSF sebagai lembaga independen yang dapat melindungi masyarakat dari pengaruh film yang negatif, guna mempertahankan

nilai dan karakter bangsa serta mendorong industri perfilman yang berdaya saing tinggi," ujar Meutya.

Selain itu, Komisi I juga mendukung LSF untuk melakukan program sosialisasi sensor mandiri ke berbagai pemangku

kepentingan sesuai yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2009 agar masyarakat dapat memilih film yang sesuai dengan kebutuhannya.

"Kami mendukung LSF untuk melaksanakan program sosialisasi sensor mandiri juga pedoman dan kriteria sensor film atau iklan film ke berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas sesuai dengan UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Sehingga masyarakat dapat memilih film yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya," jelas legislator dapil Sumatera Utara I ini.

Terkait dengan anggaran, Komisi I bersama LSF nantinya juga akan



Wakil Ketua Komisi I Meutya Viafa Hafidz

membahas secara khusus mengenai pengelolaan penerimaan dana non APBN yang bukan PNBP.

Selain itu, terkait capaian kinerja, Komisi I DPR RI meminta LSF untuk memperbaiki laporan mengenai jumlah film yang disensor, baik film nasional ataupun impor. "Komisi I DPR RI juga meminta LSF untuk memperbaiki dan menyerahkan dokumen laporan mengenai jumlah film yang masuk untuk disensor baik film nasional maupun film impor serta hasil kinerja LSF mengenai

jumlah film yang berhasil di sensor dan jumlah film yang tidak lulus sensor," jelas Meutya.

Selanjutnya, Meutya juga memaparkan terkait dengan hal-hal menyangkut LSF, Komisi I nantinya akan mengagendakan rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. "Komisi I DPR RI nanti akan mengagendakan rapat dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas hal-hal terkait dengan LSF," tutup Meutya. ■

(b), Foto: anef/br

## Membangun Stabilitas Kawasan Dibutuhkan Kerja Sama Diantara Negara Sekawasan

Untuk membangun stabilitas kawasan dibutuhkan kerja sama dan saling percaya diantara negara-negara sekawasan. Kepercayaan tidak bisa dibangun instan, harus dipupuk melalui dialog terbuka dan *fair*.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon saat menghadiri pertemuan tahunan ke-25 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di Nadi, Republik Fiji, Senin (16/01).

"Secara umum Asia Pasifik adalah kawasan yang relatif stabil. Untuk membangun stabilitas kawasan dibutuhkan kerja sama dan saling percaya di antara negara-negara sekawasan. Kepercayaan ini tidak bisa dibangun instan, melainkan harus dipupuk melalui dialog terbuka dan *fair*. Memang ada gejolak di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan, yang salah satunya menyangkut isu nuklir," kata Fadli.

Selain itu, lanjutnya, tiap negara juga harus mengedepankan penyelesaian damai atas setiap konflik yang muncul. Itu sebabnya APPF menjadi salah satu forum diplomasi yang penting.

Pertemuan tahunan ke-25 APPF yang dihelat di Natadola, Republik Fiji pada 15-19 Januari 2017. Dalam forum tersebut, DPR RI mengirimkan tujuh orang delegasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Adapun anggota delegasi lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Partai Golkar), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Sartono Hutomo

(Fraksi Partai Demokrat), dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN).

"Dalam forum APPF ke-25 ini, Indonesia menyuarakan pentingnya penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya. DPR RI telah meminta parlemen Myanmar supaya mendorong pemerintahnya menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut dengan damai dan bijaksana. Krisis kemanusiaan, di manapun, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain Rohingya, parlemen Indonesia juga menyuarakan pentingnya penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan Suriah," papar Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Pembukaan sidang APPF yang dihadiri Perdana Menteri Fiji Josia Voreqe Bainimarama, Ketua Delegasi Indonesia Fadli Zon mendapat kehormatan untuk menyampaikan *Vote of Thanks* mewakili delegasi negara-negara yang hadir. Indonesia dan Fiji kebetulan memang memiliki hubungan diplomatik yang erat dan saling mendukung dalam forum internasional.

"Kita sering lupa jika Indonesia sebagai negara bukan hanya masuk wilayah Asia, tapi juga masuk wilayah Pasifik Selatan. Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Apalagi, secara kultur kita juga memiliki irisan kebudayaan yang besar dengan negara-

negara Pasifik, seperti Papua New Guinea, atau Fiji, yang kini kebetulan jadi tuan rumah. Secara regional, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mayoritas penduduknya merupakan bangsa Melanesia, dan Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 11 juta penduduk beretnis Melanesia, yang tersebar di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua," paparnya.

Dalam Sidang Tahunan ke-25 APPF 2017, delegasi parlemen Indonesia mengajukan enam usulan resolusi, salah satunya mengenai isu persamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan. "Sejak sidang tahunan APPF dua tahun lalu, Indonesia menjadi inisiator penting isu *gender* dan pemberdayaan perempuan ini. Kita bahkan sedang mengusulkan agar soal parlemen perempuan ini masuk ke dalam statuta APPF. Selain soal perdamaian, isu *gender* ini menjadi bagian dari agenda diplomasi parlemen kita," pungkasnya. ■

(c), Foto: ade-hkap/br



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon saat menghadiri pertemuan tahunan ke-25 APPF di Nadi, Republik Fiji

## Pemerintah Diminta Perkuat Unit Siber Polri, BIN dan Kemenhan

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo memperkuat unit-unit siber yang berada di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Pertahanan untuk menangkal potensi serangan siber yang marak belakangan ini.

“Selain membentuk Badan Siber Nasional (Basinas), Presiden Joko Widodo patut memprakarsai penguatan unit-unit siber di tubuh Polri, BIN dan Kemenhan. Penguatan semua unit siber itu menjadi sangat penting untuk menangkal potensi serangan siber yang marak belakangan ini, termasuk serangan yang mengganggu aspek pertahanan dan keamanan nasional, serta serangan yang berpotensi merusak ketertiban umum,” katanya dalam rilis kepada media Minggu (15/01).

Menurutnya, untuk merespon serangan siber dari mana pun, Indonesia saat ini sudah memiliki unit *Cyber Defence* di Kementerian Pertahanan, *Cyber Intelligence* di BIN, dan *Cyber Security* di tubuh Polri. Oleh karena tantangannya terus tereskalasi, penguatan unit-unit siber di Polri, BIN dan Kementerian Pertahanan itu perlu menjadi perhatian khusus dari Presiden Jokowi.

"Eskalasi tantangan itu bisa dilihat dari keberhasilan agen rahasia Rusia menjebol pertahanan siber Amerika Serikat (AS). Badan-badan intelijen AS yang kondang, seperti CIA (Central Intelligence Agency) dan FBI (Federal Bureau of Investigation) sudah membuat pengakuan terbuka bahwa jaringan agen rahasia Rusia berhasil membobol pertahanan mereka," ungkap anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.

Melalui serangan siber, lanjutnya, Rusia mampu mengintervensi pemilihan Presiden AS, November 2016, dan sukses membantu kemenangan calon dari Partai Republik Donald Trump. Pembobolan pertahanan siber AS oleh Rusia itu tidak hanya membuat malu CIA dan FBI, tetapi juga membangun rasa cemas di

AS. Komunitas agen rahasia AS dalam FBI maupun CIA kini mencemaskan masa depan keamanan nasional negeri itu.

"Pengalaman buruk AS itu patut dijadikan pelajaran oleh pemerintah Indonesia. Apalagi, Indonesia tidak hanya rentan akan serangan siber, tetapi juga sudah punya pengalaman buruk oleh serangan intelijen asing," tandasnya.

Ia menerangkan, bahwa Presiden RI, Ibu Negara, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara pernah menjadi target penyadapan para agen rahasia *Defence Signals Directorate* Australia. Selama 15 hari sepanjang bulan Agustus 2009, intelijen Australia menyadap kegiatan Presiden RI melalui telepon genggam.

Menjelang akhir 2010, tambahnya, Wikileaks mengaku memiliki tak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS. Informasi rahasia itu mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu adalah laporan diplomatik yang dikirim Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta dan Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya.



Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo

Kini, potensi ancamannya tak lagi hanya berupa penyadapan atau pencurian dokumen. Ragam rahasia negara bisa dibobol dengan modus serangan siber. Sekali lagi, kasus serangan siber oleh agen rahasia Rusia ke AS patut dijadikan pelajaran untuk mengingatkan pentingnya Indonesia meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target serangan siber oleh intelijen dari negara lain.

"Karena itu, sangat relevan jika Presiden Jokowi segera memperkuat unit-unit siber di tubuh Polri, BIN dan Kementerian Pertahanan," pungkasnya. ■

(6). Foto: untri/hr.

## DLP Diperlukan Untuk Perluas Layanan Kesehatan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, saat ini Dokter Layanan Primer (DLP) diperlukan, guna memperluas layanan kesehatan. Apalagi saat ini lebih dari 80 persen layanan kesehatan berada pada tingkat primer.

“DLP dibutuhkan lantaran persoalan kesehatan sudah menjadi isu dan rekomendasi internasional yang mengisyaratkan layanan primer kesehatan harus ditingkatkan,” kata Sutan, usai RDPU dengan Tim Persiapan Program Studi Dokter Layanan Primer Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/01).

Belum lagi dalam penilaian DPR RI, masih kata Sutan, layanan dokter primer dan uji kompetensi dalam UU No 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran sebenarnya sudah selaras dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang - undang lain.

"Justru adanya DLP dan uji kompetensi adalah kebutuhan yang tidak terelakkan guna menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas maupun pelayanan kesehatan yang profesional," imbuh politisi F-Gerindra itu.

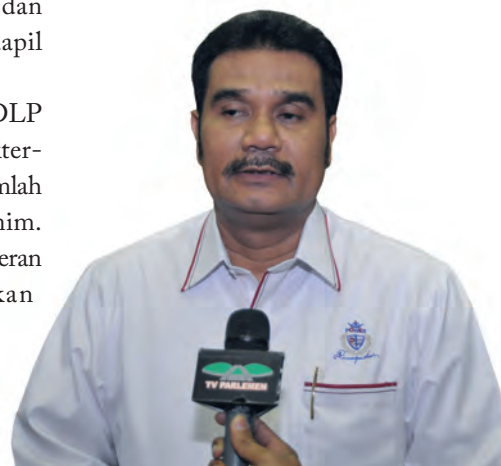
Bahkan, Sutan menegaskan, aturan ini sesungguhnya untuk melindungi masyarakat dengan kualitas layanan dan membantu peningkatan kompetensi dokter

itu sendiri. "Nanti profesi dokter itu bisa dibentuk menjadi tenaga pendidik, DLP, spesialis atau peneliti sesuai minat dan pilihan mereka," ujar politisi asal Dapil Jambi itu.

Sutan berharap, dengan adanya DLP ini nantinya juga menghasilkan dokter-dokter yang profesional. Mengingat, jumlah dokter di Tanah Air juga masih minim. Selain itu, ia berharap, Fakultas Kedokteran di berbagai universitas juga akan meningkat akreditasinya.

"Sasaran akhir dari ini semua adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perluasan layanan kesehatan di tingkat dasar atau primer, yang selama ini belum begitu tercover

karena banyaknya kebutuhan," harap politisi yang akrab dipanggil SAH itu. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra

(sf), Foto: kresna/br

## Komisi VII DPR RI Dorong Bentuk Panja Pengawasan Implementasi PP Minerba

DPR RI menanggapi secara positif dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Minerba yang mengatur kebijakan hilirisasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. Komisi VII DPR RI pun mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi PP Minerba tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha usai pelantikan dirinya sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI menggantikan Fadel Muhammad, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01). Menurutnya, dikeluarkannya PP No.1/2017 tersebut diharapkan dapat meminimalisir kegaduhan di sektor Minerba saat ini.

"Kita berharap, industri yang mendapatkan kemudahan ekspor konsentrat mineral atau ore mineral kadar rendah harus tunduk dan mematuhi perubahan dari rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan Pasal 102 dan 103 UU Minerba No. 4/2009," jelas Satya.

Poin penting lain yang menjadi sorotan politisi F-PG itu menyangkut divestasi 51 persen bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang

harus dilaksanakan secara konsisten, penciptaan lahan pertambangan sesuai dengan UU Minerba serta melaksanakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi industri sektor minerba dalam negeri.

"Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong dibentuknya Panja untuk mengawasi implementasi PP Minerba tersebut agar tetap konsisten. Kita harapkan, masa persidangan III ini bisa terbentuk," yakin politisi asal Dapil Jawa Timur IX itu.

Sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI yang baru dilantik, Satya juga menyatakan optimismenya bahwa tugas komisi bidang energi ini mampu menyelesaikan pembahasan dua revisi undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yaitu, RUU Migas dan RUU Minerba. Seperti diketahui, dua RUU tersebut telah dibahas di Komisi VII DPR RI sejak periode 2009-2014 lalu yang belum juga tuntas hingga saat

ini.

"Kita optimis RUU Migas dan RUU Minerba bisa dituntaskan tahun ini. Kita efektifkan waktu yang ada, dan saya sebagai pimpinan Komisi VII punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan pembahasan menjadi Undang-undang," tutup Satya. ■



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha

(sf), Foto: aniq/br

## KSPI Minta DPR RI Stop TKA asal China

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta DPR RI menyuarakan kepada pemerintah untuk memberhentikan (TKA) ilegal asal China dengan mencabut ijin bebas visa. Karena itu merupakan salah satu pintu masuk bagi TKA ilegal.

“Presiden jangan hanya cenderung mencari siapa yang menyampaikan berita *hoax*, tapi mengatakan dengan tegas untuk menegakkan aturan karena ini sudah melanggar UU nomor 13 tahun 2003,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/01).

Said menjelaskan yang dimaksud Ilegal itu bukan hanya karena TKA tidak memiliki dokumen resmi, namun ketika mereka bekerja sebagai *unskill*

itu juga dikatakan ilegal karena melanggar UU. Said juga mengingatkan tujuan investasi harusnya untuk pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

“Tapi kalau investasi asal China yang mendatangkan tenaga kerja dari sana dan keuntungan dari sana untuk apa, ini kan berarti investasi tidak mencapai pertumbuhan ekonomi, padahal perintah UUD jelas setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak bukan untuk TKA. Maka dari itu kami mendukung

penyusunan DPR RI membentuk pansus ini akan membuka tentang kedatangan TKA dan tujuan dibalik semua ini, kenapa hanya China yang bermasalah,” pungkasnya. ■



Presiden KSPI Said Iqbal saat audiensi dengan Komisi IX DPR RI

(rmm, s.) Foto: rizka/br

## Anggota Komisi III DPR RI Pertanyakan Himbauan Polri Untuk Menyerahkan Buku Jokowi *Undercover*

Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mempertanyakan kebijakan Polri yang menghimbau masyarakat menyerahkan buku Jokowi *Undercover*. Pasalnya, pengadilan belum menetapkan bahwa buku tersebut merupakan buku terlarang.

“Saya agak heran, institusi kepolisian meminta masyarakat menyerahkan buku itu. Ini agak aneh, pengadilan belum menyatakan buku itu terlarang. Yang berhak menyatakan buku itu terlarang hanya pengadilan. Jadi belum ada ketetapan hukum bahwa buku itu merupakan buku terlarang,” ungkap Erma sesaat sebelum rapat Panja KUHP Buku II di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (16/01).

Dulu jaman pemerintahan SBY, lanjut Erma, pernah ada buku Gurita Cikeas yang mencoba mengkritik SBY. Namun penulis dan penerbitnya tidak ditangkap. SBY kemudian membuat buku tandingan yang mencoba menjawab segala yang dituduhkan.

“Jadi menurut hemat saya, kalau ada kritik dalam bentuk buku, maka jawablah dalam bentuk buku juga.

Jangan ditangkap orangnya. Ungkapkan dalam buku itu lengkap dengan data dan fakta yang ada,” tegasnya.

Selain itu, jikapun kemudian buku tersebut dikatakan mengandung fitnah, maka yang berhak melaporkan hal tersebut adalah Presiden. Karena Presiden lah yang diduga difitnah oleh buku tersebut. Sehingga, Erma menilai pemerintah saat ini agak berlebihan.

Jika kemudian setiap buku yang mengkritik pemerintah ditangkap, maka Erma khawatir lama-lama orang tidak akan berani menulis dan menerbitkan lagi. Sehingga tidak ada lagi kebebasan menyampaikan ide, pendapat dan gagasan, bahkan kritikan.

Lebih lanjut Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini ke depan akan menanyakan hal tersebut kepada Kapolri dalam rapat kerja mendatang. Karena, jelas-jelas belum ada ketetapan

hukum dari pengadilan yang mengatakan bahwa buku tersebut merupakan buku terlarang.

Sebagaimana diketahui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto beberapa hari sebelumnya, menghimbau masyarakat yang memiliki buku Jokowi *Undercover* segera mengembalikan buku tersebut ke kepolisian. ■



Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik

(aym, s.) Foto: arif/br

## DPR RI Terima Data TKA Ilegal dari KSPI

Komisi IX DPR RI menerima data Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Data tersebut merupakan data TKA Ilegal yang tidak terdata Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker).

**D**ata diterima Komisi IX DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presiden KSPI Said Iqbal yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (16/01).

"Tujuan kami mengundang KSPI, guna mendapat informasi dari KSPI terkait jumlah tenaga kerja asing Ilegal yang tidak terdata oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Data itu nanti akan kita gunakan sebagai pembandingan dengan data yang dimiliki pemerintah," kata Saleh Daulay.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyampaikan data TKA ilegal yang ditemui di lapangan, antara lain di Banten (PT Cemindo

Gemilang) ada 275 TKA), Sukabumi (Perusahaan Sepatu dan Garmen) ada 178 TKA, Sulawesi Tengah (PT. Virtue Dragon Nikel Industri) ada 500 orang, Balikpapan (Proyek PLTU) ada 23 orang, Bali (ragam Perusahaan) ada 157 orang.

Kemudian di Batam (PT. China Huadian) ada 100-200 orang, Sulawesi Tengah (PT. Bintang Delapan) semua pekerja TKA asli Tiongkok, Ketapang Kalimantan Barat (Harita Group) ada 269 orang, Sulawesi Tengah (ragam perusahaan) ada 6.000 orang dan di Jawa Timur (ragam perusahaan) ada 1,384 TKA.

"Maka tidak benar kalau Kemenaker mengatakan hanya ada 21 ribu, data ini

kami dapat dari 200 posko pengaduan di 20 provinsi. Karena itu nanti tanggal 30 Januari kami akan melakukan gugatan warga negara terhadap pemerintah ke pengadilan negeri Jakarta," ungkapnya. ■



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay

## Dirut PT Telkom Ditantang Ambil Alih Kepemilikan Saham Asing

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN RI dan PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk meyoroti soal keamanan informasi yang dipengaruhi oleh kepemilikan saham perusahaan informasi.

**A**nggota Komisi VI Eriko Sotarduga memberikan tantangan kepada Direktur Utama PT Telkom, Alex J Sinaga agar bisa mengambil alih kepemilikan saham asing di Telkomsel. Ada 35 persen saham Telkomsel dimiliki Singapura. Padahal informasi merupakan unsur penting dari keamanan nasional, sumber dari segala hal itu dari informasi.

pendapatan

"Telkom pendapatan terbesarnya dari telkomsel. Telkomsel pemegang sahamnya adalah asing. Ada Singapura, kalau dilihat dari skalanya tidak wajar, yang hanya penduduknya 4 juta, menguasai 35 persen dari PT Telkomsel. terbesar PT Telkom dari Telkomsel," jelas Eriko di ruang rapat



Anggota Komisi VI DPR RI, Eriko Sotarduga

Komisi VI, Nusantara I, Selasa (17/01).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mempertanyakan, bagaimana pemerintah bisa mengamankan data, sementara letaknya di negara asing. "Kita harus sampaikan ke fraksi masing-masing di

Komisi I. Anda meletakkan kunci kekutan masa depan negara ini di tempat orang. Ini tantangan buat anda Pak Dirut !," seru Eriko lantang.

Selain itu anggota Komisi VI Zulfan Lindan juga menyinggung soal sikap negara kepada Google, menurutnya posisi negosiasi negara harus tinggi terhadap perusahaan jasa informasi itu. Pasalnya saat ini Google cenderung tidak taat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya soal pembayaran pajak, dan masih ada masalah lainnya.

"Google harus kita yang mengatur. Ini soal kemauan politik," ujar Zulfan. RDP ini dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno dan didampingi Wakil Ketua Mohamad Hekal. ■

## Komisi VIII DPR RI Soroti Pembentukan BPKH dan Tunjangan Profesi Guru

Komisi VIII DPR RI menyoroti proses pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan tunjangan profesi guru yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintah. Padahal pembentukan BPKH akan berdampak terhadap peningkatan pengelolaan dana haji secara profesional transparan dan bertanggung jawab.

“BPKH sampai saat ini belum terbentuk, sedangkan peningkatan pengelolaan dana haji sangat penting karena dana haji merupakan dana jamaah haji maka pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji, bukan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan jamaah haji dan umat Islam pada umumnya,” kata Ali Taher saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/01).

Komisi VIII pun, menurut Ali, menanyakan kepada Menteri Agama, bagaimana proses pembentukan BPKH, dan kebijakan yang dilaksanakan Kementerian agama untuk mempercepat pembentukan BPKH.

Selanjutnya, bagaimana kebijakan Kementerian Agama agar pengelolaan dana haji benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pembinaan perlindungan dan pelayanan pada jamaah haji bukan untuk kepentingan-kepentingan di luar jamaah.

Selain soal BPKH, dalam kesempatan kali ini, Ali Taher juga menyoroti terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan *inpassing* guru madrasah yang belum terselesaikan.

Patut diketahui, tanggal 12 Januari lalu Komisi VIII telah menerima perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), menyampaikan aspirasi diantaranya mengenai *inpassing* dan tunjangan profesi guru mereka yang masih terhutang.

"Kementerian Agama seyogyanya menyelesaikan permasalahan tersebut



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher berdialog dengan Menag

diatasi karena merupakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat. Apa kebijakan Kementerian Agama untuk menyelesaikan permasalahan *inpassing* guru madrasah yang belum terselesaikan," paparnya. ■

(as) Foto: agungfor

## Komisi VII DPR RI Apresiasi Laporan Keuangan Kemenristek Dikti

Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Kepala LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) Ristek atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meminta Kementerian Ristek Dikti, BATAN, LAPAN dan BIG untuk menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2016.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Ristek dan Dikti Muhammad Nasir yang dibacakan pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi VII S.W. Yudha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01)

"Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI untuk mengkoordinasikan Ditjen-Ditjen

terkait agar program *Science Technopark* (STP) dapat berjalan secara optimal," kata Yudha.

Selanjutnya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan



Suasana Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristek dan Dikti



Tinggi RI untuk mengkoordinasikan Balai Teknologi Hidrodinamika-BPPT di Surabaya dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM RI, dan Kementerian lainnya yang terkait agar dapat dimanfaatkan

oleh galangan-galangan kapal sehingga diperoleh hasil yang optimal.

"Komisi VII DPR RI meminta kepala LPNK agar melakukan diseminasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kepada masyarakat untuk tahun anggaran 2017," lanjut politisi Partai Golkar ini.

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Kepala LPNK untuk melakukan tindakan afirmatif pembangunan pusat unggulan IPTEK di Indonesia bagian timur pada tahun 2017. ■

(6). Foto: nuzulidjw/br.

## Komisi V DPR RI Bahas Berbagai Insiden Transportasi Dengan Menhub

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan beberapa mitra kerjanya yakni Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, BPLS, dan BPWS, guna membahas evaluasi penanganan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka perayaan Natal 2016 dan Tahun baru 2017.

Selain itu dibahas pula mengenai beberapa insiden dan kecelakaan transportasi antara lain tergelincirnya pesawat Wings Air di Bandara Ahmad Yani Semarang, Insiden Pilot Pesawat Citilink QG 800 rute Surabaya - Jakarta, tenggelamnya KM Karamando di perairan Jaliolo Halmahera Barat, terbakarnya KM Zahro Ekspres diperaian Teluk Jakarta, serta insiden meninggalnya Taruna STIP Jakarta karena dianiaya seniornya.

Komisi V DPR RI menyatakan perasaan turut berduka cita atas terjadinya beberapa kecelakaan di sektor transportasi yang terjadi pada akhir tahun 2016 lalu, yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Perasaan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam, juga diungkapkan Anggota Dewan Komisi V DPR RI atas meninggalnya alm. Amirullah, Taruna STIP Jakarta yang menjadi korban kebrutalan seniornya.



Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis berjabat tangan dengan Menhub

"Kami sangat prihatin terhadap beberapa kejadian yang melanggar regulasi dan SOP (standard operating procedure) yang telah ditetapkan di masing-masing sektor transportasi, yang menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan di sektor transportasi. Walaupun kita telah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan menyambut hari Natal, Tahun Baru dan hari libur sekolah," ucap Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis saat memimpin jalannya raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/01).

Fary juga mengatakan, terkait jalan nasional yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk libur akhir tahun 2016, Komisi V DPR RI mendapatkan banyak informasi dan masukan dari masyarakat mengenai kondisi rusak parah di beberapa ruas jalan nasional di daerah-daerah, di antaranya Lintas Pantura Jawa dan Lintas Tengah Sumatera.

"Kerusakan beberapa jalan nasional tersebut, bukan hanya disebabkan oleh faktor cuaca dan alam saja, namun juga disebabkan oleh faktor beban tonase muatan kendaraan yang melebihi batas yang telah ditentukan, tetapi tidak ada sanksi yang tegas dari regulator disektor lalu lintas dan angkutan jalan," tegasnya.

Usai mendengarkan paparan penjelasan mengenai kronologis kejadian beberapa insiden transportasi yang disampaikan oleh

Menteri Perhubungan dalam raker tersebut, Dewan tertarik untuk lebih mendalami masing-masing insiden transportasi itu, dan meminta penjelasan yang lebih mendetil lagi mengenai tindak lanjutnya kepada Menhub.

"Perlu ada terobosan yang lebih dalam terutama berkaitan dengan pengawasan yang intensif terhadap jumlah tiket yang dijual oleh operator, agar tidak melebihi kapasitas angkut melalui pelaksanaan *check in* terhadap calon penumpang. Termasuk juga peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran. KNKT harus bisa menunjukkan kapasitas berkaitan dengan hasil investigasi beberapa kejadian musibah yang terjadi," tandas Fary.

Terkait insiden di STIP Jakarta, Fary menyampaikan bahwa sebenarnya telah ada komitmen bersama pada tahun 2014, yang menyatakan tidak akan terjadi lagi kekerasan di STIP Jakarta. Dalam komitmen tersebut dimuat kesepakatan akan menutup Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, kalau terjadi lagi kekerasan. Namun kejadian itu terulang kembali, oleh karenanya Komisi V DPR RI melakukan sidak beberapa waktu lalu dan meminta dilakukan investigasi atas insiden yang mengakibatkan meninggalnya salah satu taruna STIP Jakarta akibat penganiayaan seniornya. ■

(dep). Foto: jay/br.

## Komisi III DPR RI Apresiasi GPNF MUI Ikuti Prosedur Hukum Atasi Permasalahannya

Komisi III DPR RI menghargai dan mengapresiasi langkah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang sesuai prosedur penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal tersebut terungkap dalam rapat audiensi Komisi III DPR RI dengan GNPF di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (17/01).

“ Kami bangga dengan ulama-ulama yang lebih tahu hukum. Kami menghargai dan mengapresiasi langkah GNPF yang menempuh jalur hukum dan mengikuti prosedur hukum dengan mendatangi Mabes Polri, melaporkan ke Propam dan DPR RI dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI, Abu Bakar Al Habsy.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Daeng Muhammad dari Fraksi PAN misalnya yang juga mengapresiasi langkah GNPF mengadukan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat kepada Mabes Polri dan Komisi III DPR RI.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa ini juga disepakati akan menghadirkan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Bali saat rapat kerja Komisi III dengan Kapolri pekan mendatang.

"Kita sudah mendengarkan kronologis permasalahannya dari GNPF dan kita harus mempertanyakan permasalahan ini kepada Kapolri dengan turut menghadirkan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Bali. Bagaimana mungkin polisi dapat netral jika Kapolda nya menjadi Ketua Dewan Pembina ormas tertentu. Tidak hanya itu, seolah-olah disini ada proses pembiaran dalam tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas tertentu," ungkap Daeng.

Pada kesempatan itu, di depan seluruh anggota Komisi III DPR RI dan seluruh pengunjung yang hadir di ruangan tersebut, Habib Rizieq menceritakan ikhwal laporannya ke Mabes Polri terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat.

Rizieq menjelaskan bahwa pada 12 Januari lalu pihaknya diperiksa sebagai saksi atas laporan Sukmawati terkait tuduhan penghinaan Pancasila. Saat itu menurutnya pemeriksaan berjalan sangat baik, lancar dan penyidikpun

bersikap santun terhadap dirinya. Pada kesempatan itu penyidik meminta Rizieq untuk menghimbau para pengikutnya yang berada di luar kantor Polda Jawa Barat untuk pulang dengan tertib, selain menjelaskan bahwa pemeriksaan penyidik berjalan lancar, baik dan santun.

Sayangnya menurut Rizieq, usai pengikutnya yang notabene merupakan umat muslim kembali ke rumahnya masing-masing, beberapa anggota FPI usai makan bersama habib di sebuah rumah makan, tertinggal oleh rombongan. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok orang dari GMBI (gerakan masyarakat bawah Indonesia) dan langsung dilakukan penganiayaan.

Kapolda Jawa Barat, menurut Rizieq mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina dari GMBI ini. Ia mempertanyakan aturan yang memperbolehkan polisi apalagi Kapolda masuk bahkan menjadi ketua dewan Pembina sebuah ormas. Pasalnya polisi harus bersifat netral pada semua masyarakat dan ormas. Tidak hanya itu,



Anggota Komisi III DPR RI beraudiensi dengan para tokoh GNPF MUI

lanjut Rizieq, ada dugaan Kapolda Jawa Barat sengaja mengerahkan ormas tersebut untuk menghadap dirinya dan GNPF. Padahal sebagai Ketua Dewan Pembina sejatinya ia bisa meminta ormas tersebut untuk tidak melakukan penghadangan dan tindakan anarkis.

Atas kasus tersebut, Rizieq dan GNPF meminta agar Komisi III DPR RI sesuai tugas dan fungsi kontrolnya terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kepolisian, untuk mempertanyakan hal tersebut demi penegakan hukum yang berkeadilan. ■

(Ayu), foto: rami/br

## Kemenpar Diminta Jangan Kecewakan Wisman



Anggota Komisi X DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono

Anggota Komisi X DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Pariwisata untuk tidak mengecewakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, wisman yang telah mendapat informasi menarik tentang potensi wisata Tanah Air, namun harus dikecewakan karena tidak sesuai dengan ekspektasi.

# Komisi VIII DPR RI Akan Fasilitasi Pertemuan Guru-guru Ma'had Al-Zaytun dengan Menag

Komisi VIII akan menindaklanjuti pengaduan guru-guru Ma'had Al-Zaytun dengan Menteri Agama dan Direktorat Pendidikan Islam, agar dapat dicarikan solusinya.

**K**etua Komisi VIII Ali Taher mengatakan permasalahan ini harus segera ditindak lanjuti karena tidak bisa dibiarkan proses ketidakpastian ini berlangsung terus menerus. Hal ini akan berdampak pada hak dan kewajiban yang pada gilirannya nasib para siswa akan terabaikan.

"Persoalan ini agar diselesaikan secara kekeluargaan, silaturahmi kembali agar dibicarakan dengan Yayasan. Sementara Komisi VIII secara kelembagaan akan bersama-sama dengan Menteri Agama dan Dirjen Pendidikan Agama Islam Senin pekan depan akan membahas dan mencarikan solusinya," katanya Ali Taher, saat menerima pengaduan Guru-Guru Ma'had Al-Zaytun, di Gedung DPR RI, Kamis (19/01).

Menurutnya, dinamika selalu ada, tetapi jangan mengorbankan anak didik karena persoalan yang tidak jelas. Anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti mengatakan bahwa pemberhentian tenaga pengajar secara sepihak merupakan suatu tindakan



*Suasana audiensi Komisi VIII dengan guru-guru Ma'had Al-Zaytun*

yang kurang arif, semestinya hal ini dilakukan dengan proses musyawarah dan dikomunikasikan dengan baik.

"Komisi VIII akan melakukan Raker Menteri Agama dan Dirjen Pendidikan Agama Islam, dan akan memediasi, untuk membantu mencarikan solusi. Jika memungkinkan Komisi VIII akan melakukan peninjauan ke Ma'had Al-Zaitun," tegasnya.

Perwakilan para guru Ma'had Al-Zaitun Mustaqim menjelaskan banyak guru-guru yang didemisionerkan sebagai

tenaga pengajar dan pejabat-pejabat struktural pendidikan secara sepihak. Padahal para guru tersebut telah diangkat sebagai guru tetap dan ber SK dari Yayasan tahun 1999.

"Seharusnya kami berada ditengah-tengah anak didik, dan keberadaan kami sebagai pengajar di Al-Zaytun resmi oleh Yayasan dan negara, yang terjadi, apabila kami ingin menjadi guru atau mengajar maka harus ikuti prosedur sedangkan prosedurnya kami harus melakukan permohonan untuk mengajar seperti guru yang baru melamar pekerjaan," paparnya.

Padaحال para guru tersebut telah mengajar sudah 17 tahun, sehingga menolak, dan nanti kalau sudah mengikuti prosedur dengan mengajukan permohonan lamaran, akan dikontrak selama 2 tahun, padahal sudah berstatus guru tetap. Selain itu, para guru juga merasa sedih dengan penghinaan yang dilakukan Panji Gumilang sebanyak dua kali dan dianggap sangat menyakitkan hati para guru. ■

(as), foto: jktabkr.

"Jangan sampai, wisatawan yang mendapat informasi yang cukup tentang potensi wisata Indonesia, namun ketika mereka telah mengunjungi pusat-pusat wisata, mereka kembali dengan kecewa. Tidak semua senang untuk datang kembali ke Indonesia," kata Ibas, panggilan akrab Edhie, saat raker dengan Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01).

Politisi F-Partai Demokrat itu pun sangat sepakat, jika Kemenpar memang tidak bisa berdiri sendiri dalam hal membangun sektor pariwisata. Kemenpar harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain, seperti Kementerian Perhubungan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dengan Pemerintah Daerah.

"Mestinya, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, diperkenalkan ke daerah-daerah yang destinasi pariwisatanya telah siap secara infrastrukturnya. Sehingga ketika mereka datang, mereka dapat menikmati, dan menceritakan tentang kesiapan pariwisata Indonesia dari hasil kunjungan mereka di negara masing-masing," imbuh Ibas.

Di satu sisi, Ibas juga mendorong Kemenpar untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata, mengingat sektor ini menjadi salah satu penghasil

devisa negara, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang berkabung.

"Saya juga mendukung penuh agar Kemenpar ikut menjadi bagian yang mempromosikan *event-event* pariwisata," tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Menpar Arief Yahya melaporkan, dalam kurun waktu Januari hingga November 2016, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,4 juta kunjungan, dari target 12 juta kunjungan. Sementara untuk wisatawan nusantara, tercapai 239 juta perjalanan, dari target 260 juta perjalanan. ■

(af), Foto: Krcano/br

## Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Realisasi APBN Kementerian KP

Capaian realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar 85,25 persen atau sebesar 6,42 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 7,53 triliun rupiah mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01).

**D**alam raker yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu, Komisi IV meminta penjelasan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2016 serta rencana kerja tahun 2017.

"Mohon dijelaskan capaian serapan APBN tahun anggaran 2016 untuk masing-masing program, serta mengenai postur anggaran tahun 2017 sebesar 9,29 triliun rupiah berdasarkan jenis belanja di setiap unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk kegiatan prioritas sarana prasarana dan bantuan masyarakat kelautan perikanan," ucap Edhy Prabowo.

Selain itu, Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan terkait dengan hasil temuan kunjungan kerja dan isu-isu aktual yang berkembang dimasyarakat, diantaranya mengenai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperjuangkan

penyuluh perikanan bantu (PPB) untuk diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

U p a y a koordinasi KKP dengan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyuluh PNS yang statusnya berubah dari daerah ke pusat, serta SOP KKP dalam mengawal atau mendampingi galangan kapal untuk enam bulan ke depan yang mengalami kekurangan bahan baku, juga menjadi perhatian Komisi IV untuk meminta penjelasan kepada Menteri KKP.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron juga menyatakan apresiasi atas keteguhan Menteri Susi Pudjiastuti untuk tetap tidak memberikan



*Pimpinan Komisi IV DPR RI*

izin terhadap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, hingga memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

"Saya memberikan apresiasi atas keteguhan hati Bu Menteri untuk tetap tidak memberikan izin terhadap reklamasi Teluk Jakarta, sampai memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kita tidak ingin dikemudian hari, hal ini menjadi presiden buruk dan aturan-aturan negara ditabrak demi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. ■"

*(dep.mp), foto: jey.br*

## BURT DPR RI Pantau Fasilitas RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya

Tim Kunker Spesifik BURT DPR RI mengunjungi Rumah Sakit (RS) Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI beserta keluarganya. Rombongan BURT meninjau fasilitas, pelayanan, dan koordinasi dengan PT Jasindo selaku provider di Palangka Raya, Senin (16/1).

**D**ipimpin Wakil Ketua Hasrul Azwar dari F-PPP, Tim berkesempatan meninjau beberapa ruangan dan fasilitas RS tersebut. Menurut Azwar, maksud kunjungan ke RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya untuk melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit Provider dari PT Asuransi Jasindo sebagai pelaksana program Jamkestama untuk Anggota Dewan beserta keluarganya.

Dijelaskan pula, Tim BURT ingin

mengetahui sejauhmana persiapan RS Islam PKU Muhammadiyah ini sebagai RS Provider yang ditunjuk oleh PT Jasindo untuk melayani pasien yang ditempatkan di VVIP. Diantaranya Anggota Dewan dan pejabat negara lainnya seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu Tim BURT juga ingin mengetahui sejauhmana



*Tim Kunspek BURT DPR RI mengunjungi RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, Kalteng*

mereka mempersiapkan diri apabila ada Anggota Dewan yang sakit kemudian memerlukan perawatan. Juga dipertanyakan, apakah RS itu telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) bagaimana melayani Anggota Dewan yang berkeinginan untuk dirawat di RS *Provider*. Apakah RS itu sudah memiliki fasilitas, misalnya ruangan VVIP.

"Ini yang mau kita lihat. Karena dari

berbagai tinjauan sebelumnya ada RS *Provider* yang belum sepenuhnya siap melayani Anggota Dewan yang berobat atau akan rawat inap," ungkap politisi Fraksi PPP.

RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, menurut Hasrul, ruangan VVIPnya baru tersedia 2 (dua) kamar dengan fasilitas yang masih minim. Pihak RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya berjanji akan membangun 8 (delapan) kamar

VVIP yang permanen dan memenuhi standar.

"Yang kita lihat tadi kamar VVIPnya belum memenuhi standar walaupun namanya sudah VVIP, tapi belum memenuhi standar," tegasnya. Ke depan BURT akan berkoordinasi lagi dengan PT Jasindo, dan meminta untuk menetapkan RS *Provider* di daerah yang benar-benar memenuhi persyaratan. ■

(fsw), foto: iwan armanias/br

## Antisipasi Kericuhan, KPU Diminta Tunda Pilkada Yang Bermasalah

Anggota Komisi II DPR RI Libert Kristo Ibo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pilkada di beberapa tempat yang bermasalah di Papua karena berpotensi menimbulkan kericuhan seperti di Kota Jayapura dan Kabupaten Dogiyai terutama sejak keluarnya keputusan KPU yang menggugurkan salah satu pasangan calon.

Menurut Ibo, pihaknya di Komisi II DPR menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya kekacauan dalam proses pelaksanaan Pilkada di sejumlah tempat, terutama di dua kabupaten/kota Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Dogiyai.

"Kami menemukan misalnya di Kota Jayapura persoalan kesalahan administrasi proses pendaftaran calon dan penetapannya oleh KPU yang kemudian menimbulkan dampak hukum dan hari ini berujung dibatalkannya salah satu pasang calon dan situasi sosial politik di tengah masyarakat saat ini menjadi rawan," ujar legislator dapil Papua tersebut pada Selasa, (17/01).

Hal sama terjadi di Kabupaten Dogiyai, salah satu pasangan calon harus gugur karena persoalannya terkait SK penetapan Partai PKPI yang memberikan dua dukungan berbeda kepada pasangan calon.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, pembatalan calon oleh KPU terhadap pasangan calon di Kota Jayapura dan Dogiyai syarat muatan politis dan menabrak hukum serta berpotensi ricuh. Hal ini amat

membahayakan stabilitas di Papua.

"Karena itu setelah kami pelajari kasus yang ada di Jayapura dan Dogiyai, KPUD dan KPU sangat tidak profesional. Kalau SK PKPI dipermasalahkan harusnya semua pasangan calon yang memakai SK yang sama di seluruh Indonesia harus batal. Kenapa lalu di beberapa kabupaten justru tetap sah? Ini ada apa?" tanya Ibo.

Karena itu, salah satu rekomendasi saat menggelar pertemuan dengan KPU dan DPR pada minggu lalu adalah mendesak agar KPU memeriksa kembali semua tahapan Pilkada di dua daerah tersebut.

Selain itu, untuk sementara waktu dalam rangka meredam situasi yang cenderung panas, terutama di Papua, pemerintah dalam hal Menteri Dalam Negeri dan KPU harus mengambil keputusan untuk menunda Pilkada sampai semua proses ini selesai.

Ia khawatir jika kondisi ini terus dilanjutkan, maka akan terjadi kericuhan yang menimbulkan pertumpahan darah

di Papua. "Kalau tidak, saya takut akan terjadi pertumpahan darah, dan tanda-tanda seperti itu saat ini sudah ada," kata Ibo.

Ibo juga mendapatkan temuan yang sama seperti di Kabupaten Buton, Bualemo, dan Pematangsiantar. Ia pun akan menjalankan fungsi pengawasan dalam proses pelaksanaan Pilkada ini. "Saat ini kami tengah menggunakan hak penyelidikan kami untuk melihat semua pengaduan masyarakat ini agar dibentuk Pansus Pilkada," pungkask Ibo. ■

(ib), Foto: Jry/br



Anggota Komisi II DPR RI Libert Kristo Ibo

## Revisi LPMPUTS Syaratkan Pembentukan Komite Etik

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menegaskan semangat penguatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) tidak perlu dikhawatirkan.



*Pimpinan Baleg DPR RI*

**K**arena revisi RUU itu juga akan mengamankan pembentukan Komite Etik yang dapat mengontrol lembaga independen tersebut.

Kalau ada fungsi Komite Etik yang mengawasi KPPU, tentu tidak akan terjadi *abuse of power* dari KPPU. Sementara, terkait pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan, nanti akan kita cari rumusan-rumusan yang tidak melanggar KUHAP," ungkap Totok usai Rapat Dengar Pendapat dengan Mabes Polri terkait LPMPUTS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01).

Menurutnya, penguatan KPPU merupakan sebuah kebutuhan terutama dalam persaingan ekonomi sekarang ini yang cenderung semakin liberal. Selain itu, penguatan KPPU bukan hanya

melindungi persaingan usaha terhadap kepentingan masyarakat.

"Juga bisa melindungi negara dari persaingan usaha tidak sehat dengan negara lain. Ini yang sedang dikaji juga supaya diberikan kewenangan penyidikan kepada KPPU," imbuh politisi PAN itu.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, perwakilan Polri menyampaikan tanggapannya atas rencana revisi UU KPPU. Menurutnya, KPPU tidak perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan beberapa pertimbangan.

Diantaranya, bahwa anggota KPPU bukanlah Aparatur Sipil Negara sehingga belum memenuhi syarat sebagai penyidik. Namun, apabila KPPU tetap diberikan kewenangan itu, maka dapat mengambil penyidik perbantuan

dari Polri.

Menanggapi hal itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan akan disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam KUHAP kewenangan penyidikan dan penyelidikan hanya diberikan kepada Kepolisian.

"Pembentukan norma baru tentu dimungkinkan dan tidak salah, namun bagaimana penataan hubungan antar lembaga ini bisa baik di kemudian hari, ini yang kita inginkan sehingga idealitas RUU ini bisa berkembang dan diterima oleh semua pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengatakan penguatan KPPU tetap akan menjadi esensi utama dalam RUU ini. Oleh karena itu, diharapkan nantinya kolaborasi KPPU dan Polri dapat berjalan dengan baik dalam melakukan penindakan. Apalagi, kepolisian memiliki aparaturnya yang banyak dan memiliki upaya paksa yang cukup diberi kewenangan oleh UU.

"Ini yang harus dimanfaatkan oleh KPPU, apakah kewenangan penuh mutlak kita berikan, dari penyidikan sampai kepada persidangan memutuskan perkara itu boleh atau tidak nanti akan menjadi pembahasan selanjutnya," tandasnya. ■

(am), Foto: jayadi/hr

## Indonesia Usulkan Enam *Draft* Resolusi dalam Sidang APPF

Delegasi Indonesia mengusulkan enam draf resolusi yang akan diperjuangkan dalam Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji, 15-19 Januari 2017. Keenam draf yang diusung meliputi isu ekonomi, sosial, politik, perdamaian hingga keamanan negara-negara di Asia Pasifik.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon saat acara APPF di Nadi, Republik Fiji

**K**etua Delegasi Indonesia di APPF, sekaligus Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon mengatakan, Indonesia berkomitmen akan terus berupaya dan mendorong negara-negara di Asia Pasifik meningkatkan kerja sama untuk mewujudkannya. Apalagi Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam forum tahunan yang diselenggarakan pertama kali pada 1993 di Jepang ini.

"Kita berharap hasil-hasil pembicaraan yang menyangkut perdamaian, keamanan, ekonomi, sosial maupun budaya itu selalu menjadi bahan-bahan kajian dalam APPF, dan kita akan selalu aktif berpartisipasi," kata Fadli di Nadi, Fiji, Minggu (15/01) waktu setempat.

Menurut politisi F-Gerindra itu, APPF merupakan

forum internasional yang cukup strategis. Keputusan-keputusan di forum ini akan ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam berbagai kebijakan di negara masing-masing melalui parlemennya.

"Itu artinya, dari 27 negara anggota dalam APPF, terwakili miliaran penduduk di Asia Pasifik oleh parlemen dari negara masing-masing," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Indonesia sekaligus Anggota BKSAP DPR RI Yoseph Umar Hadi menjelaskan, *draft* resolusi pertama yang diusung Indonesia dalam sidang pleno APPF adalah terkait masalah pemerintahan yang baik dan praktik antikorupsi. *Draft* kedua, terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ketiga, lanjut politisi F-PDI Perjuangan itu, mendorong konservasi dan penggunaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem bumi, samudera, laut dan sumber daya kelautan. Keempat yakni tentang keamanan makanan di regional Asia Pasifik. Kelima, adalah dialog antar agama dan budaya. Serta yang terakhir yakni masalah perdamaian dan keamanan.

"Jadi isu mengenai bagaimana mempromosikan mengenai perdamaian dan keamanan di suatu wilayah. Asia Pasifik memerlukan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai dan aman, itu juga menjadi penting," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sidang tahunan yang dibuka secara resmi oleh ketua parlemen dari tuan rumah Fiji, Jiko Luveni pada Senin (16/01) waktu setempat itu akan mengangkat tema "Kerja Sama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan".

Beberapa delegasi Indonesia yang ikut dalam Forum Parlemen Asia Pasifik di antaranya Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Anggota BKSAP DPR RI diantaranya Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo (F-Gerindra), Sartono Hutomo (F-PD), dan Desy Ratnasari (F-PAN). ■



# LENSA PARLEMEN



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto menerima pengurus Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.  
Rabu (18/01), Foto: Andri/hr

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan membahas Evaluasi APBN-P 2016 dan outlook 2017 dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng.  
Rabu (18/1) foto: Azka/hr



Komisi I DPR RI RDP dengan LSF dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafidz  
Senin (16/01), Foto : Arief/hr